Tugas 3 Pengantar Sosiologi

Nama : Aditya NurHidayat Alim

Prodi : Ilmu Perpustakaan

Jawaban :

1. Analisis masalah penyekapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dapat dilakukan dengan mengacu pada beberapa teori perilaku, seperti teori perilaku devian atau teori konflik. Mari kita tinjau beberapa aspek potensial:

• Teori Perilaku Devian:

- Pengaruh Lingkungan: Apakah faktor lingkungan, seperti kondisi sosial dan budaya, memainkan peran dalam mendorong perilaku devian tersebut? Misalnya, apakah terdapat tekanan atau norma tertentu di unit militer yang mungkin mempengaruhi perilaku individu?

- Faktor Individu: Apakah terdapat faktor-faktor individu seperti masalah kesehatan mental, stres, atau konflik pribadi yang dapat memberikan kontribusi terhadap perilaku devian tersebut?

- Sanksi Sosial: Bagaimana masyarakat atau lingkungan sekitar merespons perilaku tersebut? Apakah ada sanksi sosial yang memengaruhi perilaku individu atau membentuk norma di sekitarnya?

• Teori Konflik:

- Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan: Apakah ada ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang mungkin menjadi pemicu konflik antara individu atau kelompok? Misalnya, adakah ketidakpuasan terhadap kebijakan atau perlakuan di dalam organisasi?

- Kekuatan dan Kontrol: Bagaimana dinamika kekuatan dan kontrol di dalam organisasi atau lingkungan tersebut? Apakah terdapat ketidakseimbangan kekuatan yang mendorong perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum?

- Ketegangan Struktural: Apakah ada ketegangan struktural atau konflik antara individu atau kelompok di dalam organisasi atau masyarakat yang mungkin memicu perilaku yang ekstrem?

Analisis dengan teori-teori ini dapat membantu memahami latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku oknum anggota TNI dalam kasus tersebut. Penting untuk mencari solusi yang sesuai, seperti penyelidikan internal dan tindakan disipliner yang tegas, serta peningkatan pengawasan dan pembinaan di lingkungan militer.

1. Selain melalui persidangan hukum, penerapan sanksi sosial juga dapat menjadi pendekatan dalam menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat pertahanan negara seperti TNI dan POLRI. Sanksi sosial merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk menegakkan norma dan nilai-nilai masyarakat. Beberapa bentuk sanksi sosial yang patut dipertimbangkan meliputi:

• Pemecatan atau Diskors:

- Kaitan dengan Materi Kontrol Sosial: Sanksi ini dapat dianggap sebagai bentuk kontrol sosial formal yang diberlakukan oleh institusi atau organisasi sebagai respons terhadap perilaku yang melanggar norma dan etika. Hal ini dapat memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima di dalam lembaga tersebut.

• Boikot dan Isolasi Sosial:

- Kaitan dengan Materi Kontrol Sosial: Masyarakat dapat memberlakukan sanksi sosial informal dengan cara mengisolasi atau menjauhi individu atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kejahatan. Boikot sosial ini dapat memberikan tekanan psikologis dan sosial yang signifikan.

• Dukungan Terhadap Korban:

- Kaitan dengan Materi Kontrol Sosial: Masyarakat dapat memberikan dukungan moral dan praktis kepada korban kejahatan yang dilakukan oleh oknum aparat pertahanan negara. Hal ini dapat menciptakan solidaritas sosial dan memperkuat norma-norma keadilan.

• Kampanye Kesadaran Publik:

- Kaitan dengan Materi Kontrol Sosial: Organisasi masyarakat sipil, media, dan individu dapat menginisiasi kampanye kesadaran publik untuk menyoroti dan mengutuk tindakan kejahatan yang melibatkan oknum aparat pertahanan negara. Ini dapat memperkuat norma-norma etika di tengah masyarakat.

• Pelatihan dan Pembinaan Etika:

- Kaitan dengan Materi Kontrol Sosial: Menyelenggarakan program pelatihan dan pembinaan etika bagi personel aparat pertahanan negara dapat menjadi langkah proaktif untuk mencegah tindakan kejahatan di masa mendatang. Ini mencerminkan pendekatan preventif dalam kontrol sosial.

Penerapan sanksi sosial ini bergantung pada respons masyarakat, kebijakan organisasi, dan keseriusan pihak berwenang. Namun, penting untuk memastikan bahwa tindakan sanksi sosial diarahkan pada individu atau kelompok yang bersangkutan, dan tidak menciptakan ketidakadilan atau stereotip terhadap institusi aparat pertahanan negara secara keseluruhan.

1. Perilaku menyimpang atau kejahatan yang dilakukan oleh oknum TNI dapat memiliki dampak serius terhadap institusi tempat mereka bekerja. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

• Merusak Reputasi Institusi:

– Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI dapat merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Masyarakat dapat melihat institusi tersebut dengan skeptis dan kehilangan kepercayaan pada keberlanjutan norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

• Melemahkan Solidaritas dan Kepercayaan Internal:

– Perilaku menyimpang dapat menciptakan perpecahan dan kecurigaan di antara anggota institusi. Solidaritas dan kepercayaan antaranggota dapat terkikis, mempengaruhi efektivitas dan kohesivitas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

• Pengaruh Terhadap Disiplin dan Etika:

– Tindakan kejahatan dapat menciptakan norma devian di dalam institusi, mengurangi tingkat disiplin, dan merusak budaya etika yang telah dibangun dengan susah payah. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas dan profesionalisme personel.

• Potensi Ketidakpuasan Masyarakat:

– Masyarakat bisa menjadi kecewa dan tidak puas terhadap institusi yang seharusnya melindungi dan melayani mereka. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan mengganggu hubungan antara institusi dan masyarakat.

• Intervensi dan Perubahan Kebijakan:

– Adanya kejahatan oleh oknum TNI dapat memicu tekanan untuk melakukan intervensi dan perubahan kebijakan dalam organisasi. Ini dapat mencakup reformasi internal, evaluasi prosedur, atau peningkatan pengawasan.

• Dampak Psikologis pada Anggota yang Loyal:

– Anggota TNI yang loyal dan berkomitmen dapat merasakan dampak psikologis yang signifikan karena tindakan beberapa individu. Ini dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian di antara mereka.

Penting untuk dicatat bahwa dampak tersebut dapat diatasi melalui langkah-langkah preventif dan tindakan korektif yang tegas. Penegakan disiplin, transparansi, dan akuntabilitas adalah faktor kunci dalam memulihkan integritas dan reputasi institusi. Tindakan ini juga penting untuk menjaga tatanan sosial yang sudah ada di dalam institusi tersebut.

Sekian terima kasih

Sumber : Diri Sendiri, BMP ISIP4110, www.studocu.com